



LELANG JAMINAN HAK TANGGUNGAN OLEH KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA MAKASSAR

Oleh:

M. Natsir Thaif ¹, Siti Ismijati Jenie ², dan Anwar Borahima ³

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 terhadap Bank Umum Milik Negara sebagai pemegang hak tanggungan, mengetahui perlindungan hukum pemenang lelang atas objek jaminan yang diikat hak tanggungan serta kendala yang dihadapi KP2LN dalam pelaksanaan lelang jaminan yang diikat hak tanggungan.

Penelitian mengenai lelang jaminan hak tanggungan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Makassar merupakan penelitian yang bersifat empiris, karena akan diteliti dalam hal lelang jaminan debitor serta berbagai pengertian hukum yang terdapat dalam hal pelelangan yang diikat hak tanggungan, disamping itu dilakukan penelitian lapangan. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) di Kota Makassar.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan eksekusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 terhadap hak parate eksekusi belum sepenuhnya dilakukan oleh Bank Umum Milik Negara sebagai pemegang hak tanggungan. Hal ini dikarenakan untuk melelang jaminan hak tanggungan masih memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri, namun hal tersebut telah memberikan perlindungan hukum terhadap lembaga perbankan milik negara selaku pemegang hak tanggungan. Perlindungan hukum pemenang lelang hak tanggungan telah diberikan oleh undang-undang, namun terdapat kendala yang dihadapi oleh pemenang lelang seperti masih dikuasainya objek jaminan hak tanggungan oleh pihak lain dikarenakan tidak adanya ketentuan yang mengatur tentang pengosongan objek jaminan. Adapun kendala bagi Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) untuk menyelesaikan piutang negara adalah adanya penetapan penundaan dan pembatalan eksekusi lelang dari Pengadilan Negeri.

Kata Kunci: Lelang Jaminan Hak Tanggungan.

¹ Nusa Tamalanrea Indah Blok DA No. 2 Makassar.

² Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

³ Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.



AUCTION OF GUARANTY FOR BEARING RIGHTS BY THE OFFICE OF STATE LOAN AND AUCTION SERVICE, MAKASSAR

M. Natsir Thair¹, Siti Ismijati Jenie², Anwar Borahima³

ABSTRACT

The objectives of this research are to know the execution based on the Act no. 4/1996 and Act No. 49 Prp.1960 for State-owned Bank that holds the bearing rights, to know the legal protection for the auction winner of object of guaranty bound by bearing rights, and to identify the problems faced by the KP2LN in the execution of an auction of object of guaranty bound by bearing rights.

This research is an empirical research, for it researches into auction of debtor's guaranty and other legal concepts involved in an auction bound by bearing rights. In addition, it also conducts field research in the Office of State Loan and Auction Service (KP2LN) in Makassar city.

The research results reveal that the execution based on the Act no. 4/1996 and Act no. 49 Prp. 1960 on the execution *parate* rights has not been completely performed by the State-owned bank as the holder of bearing rights. This results from the fact that doing auction of bearing rights still requires a decision from the District Court, although it has already given legal protection to the State-owned bank as the holder of bearing rights. Legal protection for the winner in an auction of bearing rights has been provided by the act, but there are problems encountered by the auction winner such as the fact that the object of guaranty for bearing rights is still under the control of another party due to lack of regulation governing the release of object of guaranty. Meanwhile, the problem faced by the KP2LN to settle state loan is the existence of the District Court decision on auction execution delay and cancellation.

Keywords: Auction of Guaranty for Bearing Right

¹ Nusa Tamalanrea Indah Blok DA No. 2 Makassar

² Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta

³ Faculty of Law, Hasanuddin University, Makassar